

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENYEDIAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

CHAIRUNISA

NIM. 07011281924052

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

CHAIRUNISA

07011281924052

	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I		
1. Dr. Alamsyah S.IP., M.Si. NIP. 197808182009121002		30/03/2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

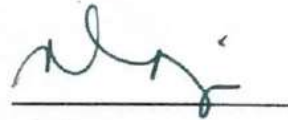
Oleh :

CHAIRUNISA
07011281924052

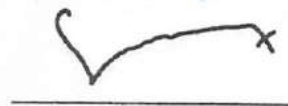
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 10 April 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

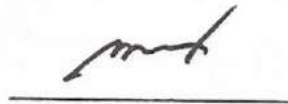
Dr. Alamsyah S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121002



Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002




Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,



Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairunisa

NIM : 07011281924052

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

Inderalaya, 30 Maret 2023



Chairunisa

NIM.07011281924052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Maka apabila kamu telah selesai (dari segala urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(QS. Al-Insyirah: 7)

Atas ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu
3. Para Dosen dan Staff Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Para Rekan Seperjuangan Administrasi Publik 2019
6. Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota Palembang. Isu lingkungan hidup merupakan isu dengan tujuan paling banyak dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup adalah dengan menyediakan ruang terbuka hijau. Kota Palembang memiliki 10,63% ruang terbuka hijau dari 30% proporsi ruang terbuka hijau yang telah diamanatkan. Disperkimtan Kota Palembang yang bertanggung jawab dalam penyediaan ruang terbuka hijau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota serta Bappeda, PT Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel sebagai pihak swasta dan WALHI sebagai perwakilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dengan menggunakan software NVIVO. Penelitian ini menggunakan teori model *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota Palembang telah berjalan cukup baik. Penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama telah terlaksana, namun masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dari ketiga variabel tersebut seperti belum ada kepemimpinan yang terstruktur, belum ada struktur kolaborasi dan belum ada rapat global yang dihadiri oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kata Kunci : kolaborasi, ruang terbuka hijau, tata kelola, tata kelola pemerintahan kolaboratif, tujuan pembangunan berkelanjutan

Pembimbing



Dr. Alamsyah S.I.P., M.Si
NIP. 197808182009121002

Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the process of collaborative governance in the provision of green open spaces in Palembang City. Environmental issues are issues with the most goals in the Sustainable Development Goals (SDGs). One of the government's efforts to protect the environment is to provide green open spaces. Palembang City has 10.63% green open space from the 30% proportion of green open space that has been mandated. Disperkimtan Palembang responsible for providing green open spaces collaborate with related parties such as the Public Works and Spatial Planning Office, the Environment and City Sanitation Service and the Bappeda. PT Jasa Raharja and Bank Sumsel Babel as private parties and WALHI as community representatives. The research method used is qualitative with a descriptive approach, data obtained from interviews, observation and documentation which will then be processed using NVIVO software. This research uses collaborative governance model theory from Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). The results of the study show that collaborative governance in the provision of green open spaces in Palembang City has been going quite well. The mobilization of shared principles, shared motivation, and capacity to carry out joint actions has been implemented, but there are still a number of indicators that have not been fulfilled from the three variables such as the absence of structured leadership, the absence of a collaboration structure and the absence of global meetings attended by the government, the private sector and society.

Kata Kunci : *collaborative, collaborative governance, governance, green open space, sustainable development goals*

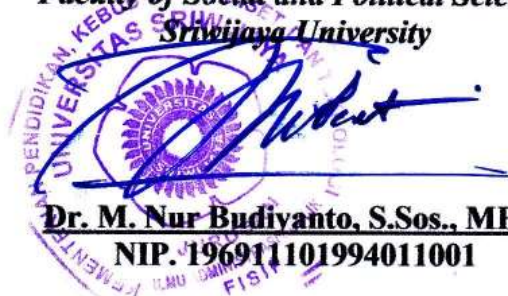
Advisor



Dr. Alamsyah S.P., M.Si
NIP. 197808182009121002

Indralaya, March 2023

**Chairman of the Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bimbingan, petunjuk, semangat serta bantuan dari berbagai pihak sehingga semua hambatan dan rintangan dapat terlewati. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua Orang Tua, Ayah tercinta M. Arief Dwi Prasetyo dan Ibu tercinta Elly Yuliati kedua saudara, Nur Ulhusna dan Muhammad Fauzan Azima serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Alamsyah S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pengampu mata kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah yang telah bersedia memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA., selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Rekan seperjuangan Anggi Savitri dan Ira Ananda Putri, yang selalu senantiasa memberikan bantuan, semangat serta dukungan

12. Sahabatku Aulia Putri, Ajeng Nurliana dan Telita Charoline yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah serta memberi masukan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis di masa yang akan datang. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik itu jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Palembang, 30 Maret 2023

Chairunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Governance	11
2.2 Konsep Kolaborasi	13
2.3 Collaborative Governance	15
2.3.1 Definisi <i>Collaborative Governance</i>	15
2.3.2 Tujuan Melaksanakan <i>Collaborative Governance</i>	17
2.3.3 Teori & Model <i>Collaborative Governance</i>	19
2.4 Ruang Terbuka Hijau	30
2.4.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau	30

2.4.2	Tujuan, Fungsi dan Manfaat RTH	31
2.4.3	Jenis- Jenis RTH	32
2.5	Teori Collaborative Governance yang Digunakan dalam Penelitian...	33
2.6	Penelitian Terdahulu.....	37
2.7	Kerangka Pikir	43
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
3.1.	Jenis Penelitian	44
3.2.	Definisi Konsep	44
3.3.	Fokus Penelitian	45
3.4.	Jenis dan Sumber Data	48
3.5.	Informan Penelitian	48
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7.	Teknik Analisis Data	51
3.7	Sistematika Penulisan	52
BAB IV	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1	Kota Palembang	54
4.1.2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang	56
4.1.3	Struktur Organisasi Disperkintan Kota Palembang	57
4.2	Hasil Penelitian Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang	58
4.2.1	Penggerakan Prinsip Bersama	59
4.2.2	Motivasi Bersama	68
4.2.3	Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	76
4.3	Diskusi	86
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN.....	96
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang Tahun 2011-2021	3
Tabel 2 Persentase Ruang Terbuka Hijau RTH Provinsi Sumatera Selatan	5
Tabel 3 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang.....	6
Tabel 4 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 5 Operasional Variabel Penelitian	46
Tabel 6 Informan Penelitian.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Kerja Integratif Untuk Collaborative Governance	19
Gambar 2 Tiga Tahap Penilaian Collaborative Governance dan Perencanaan Tindakan Ratner (2012)	26
Gambar 3 Model Collaborative Governance Ansell & Gash.....	27
Gambar 4 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 5 Peta Wilayah Kota Palembang	55
Gambar 6 Rapat Koordinasi di Bappeda.....	62
Gambar 7 Visualisasi Variabel Penggerakkan Prinsip Bersama	67
Gambar 8 Visualisasi Variabel Motivasi Bersama	75
Gambar 9 Visualisasi Variabel Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	85

DAFTAR SINGKATAN

CG	: <i>Collaborative Governance</i>
CGR	: <i>Collaborative Governance Regime</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
NPM	: <i>New Public Management</i>
NPS	: <i>New Public Service</i>
OPA	: <i>Old Public Administration</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PRKP	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTHP	: Ruang Terbuka Hijau Publik
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	96
Lampiran 2 Surat Tugas Skripsi.....	98
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi	99
Lampiran 4 Lembar Perbaikan Seminar Proposal	101
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu program yang dirancang untuk pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola serta lingkungan. SDGs merupakan lanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dijalankan pada tahun 2000-2015.

SDGs mempunyai 17 tujuan (*goals*) dengan 169 indikator. Tujuan SDGs dibagi menjadi empat dasar utama terkait pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan hukum dan tata kelola serta pembangunan lingkungan. Dari pembagian dasar tersebut salah satu isu dengan tujuan SDGs paling banyak adalah isu lingkungan hidup yang berisi tujuan mengenai kota dan pemukiman, air dan sanitasi, perubahan iklim, produksi dan konsumsi pangan, darat, dan kelautan.

SDGs telah masuk dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia. 169 indikator dari SDGs telah diintegrasikan ke dalam RPJMN tahun 2017-2030 dan telah diatur dalam PP No.59 Tahun 2017. Pemerintah telah berkomitmen dalam melaksanakan program SDGs melalui gerakan pemerintah yang membuat pelaksanaan SDGs di tingkat pusat maupun daerah dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Dalam pelaksanaan SDGs pemerintah juga melibatkan berbagai pihak *stakeholders* non-pemerintah berbeda dengan pelaksanaan MDGs yang terkesan

eksklusif hanya dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya. Hal ini mencerminkan adanya tata kelola pemerintahan kolaboratif atau yang dikenal dengan *collaborative governance* dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs khususnya tujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Collaborative governance diartikan menjadi tata kelola pemerintahan kolaboratif. Adanya pergeseran paradigma Administrasi Publik Lama (OPA) ke Manajemen Publik Baru (NPM) memunculkan istilah kolaboratif. Istilah *governance* muncul untuk menggantikan istilah *government*. *Governance* memberi penekanan terhadap keterlibatan aktor non-pemerintah sedangkan *government* hanya menekankan kepada institusi pemerintah.

Di Indonesia, anjuran untuk melibatkan beberapa pihak/aktor *governance* telah tersirat dalam beberapa undang-undang. Salah satunya yakni Undang-Undang No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang Kota biasanya akan menghadapi berbagai permasalahan, seperti permasalahan ekonomi, sosial, hukum, politik, lingkungan dan lainnya. Namun pemanfaatan ruang merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan tata ruang kota, khususnya dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Apabila dihubungkan dengan terjadinya pemanasan global maka eksistensi RTH menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kota dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup sejalan dengan pencapaian salah satu tujuan SDGs yaitu pembangunan lingkungan.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan yang sering terjadi pada kawasan perkotaan di Indonesia akibat adanya urbanisasi. Hal ini

perpengaruh terhadap sulitnya pengelolaan ruang kota dan pemanfaatan ruang kota yang kurang maksimal. Pemerintah harus lebih memperhatikan penataan ruang kota terutama dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

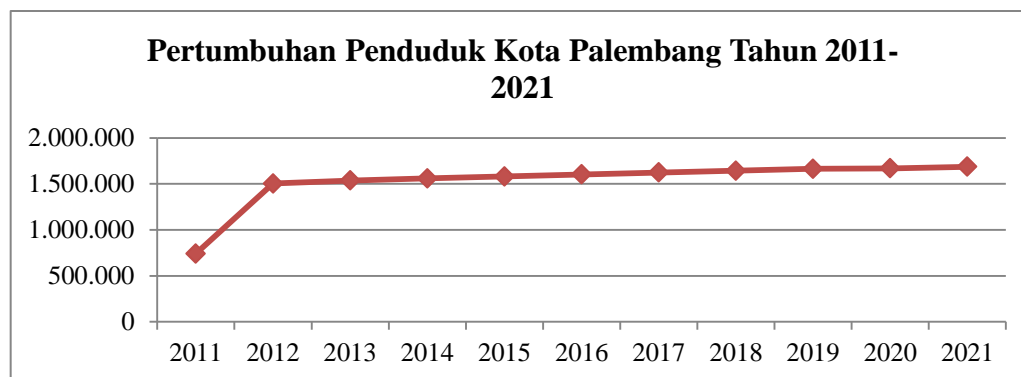
Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang Tahun 2011-2021

NO	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2011	741.356
2.	2012	1.503.485
3.	2013	1.535.900
4.	2014	1.558.494
5.	2015	1.580.517
6.	2016	1.602.071
7.	2017	1.623.099
8.	2018	1.643.488
9.	2019	1.662.893
10.	2020	1.668.164

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Di Kota Palembang, seperti ditunjukkan Grafik 1.1 penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pertumbuhan. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Palembang mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 926.808 jiwa terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2022

Suatu wilayah kota paling sedikit memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota yang ditentukan dalam pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah daerah Kota bertanggung jawab dalam menyediakan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan 10% lainnya disediakan oleh sektor privat yang kemudian disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau Privat.

Pada umumnya, RTH merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam wilayah kota. RTH memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di kawasan perkotaan. Kota Palembang sebagai kawasan perkotaan harus melakukan upaya dalam memenuhi proporsi kebutuhan RTH, sebagai salah satu unsur dalam pelayanan perkotaan berdasarkan amanat dari UU No.26 Th.2007 tentang Penataan Ruang.

Tabel 2 Persentase Ruang Terbuka Hijau RTH Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²) (A)	Luas RTH (km ²) (B)	% RTH (B/A)
Kota Palembang	400.61	4.260,39	10.63
Kota Prabumulih	434.46	4.72758	1.09
Kab. Ogan Komering Ulu	4,797.00	0.01300	0.00
Kab. Ogan Komering Ilir	19,023.47	0.98742	0.00
Kab. Muara Enim	187.08	21.08166	11.27
Kab. Lahat	4,361.84	0.32056	0.01
Kab. Musi Rawas	6,357.09		
Kab. Musi Banyuasin	14,265.96	6,882.00455	48.24
Kab. Banyuasin	11,875.00	294.95725	2.48
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	102.16	0.11422	0.11
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5,493.94	-	-
Kab. Ogan Ilir	2,666.07	-	-

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Tabel 1.2 menunjukkan persentase RTH yang ada di Sumatera Selatan. Sampai tahun 2022, proporsi RTH di Kota Palembang hanya sebesar 10,63%. Hal ini menunjukkan bahwa RTH di Kota Palembang masih belum memenuhi proporsi RTH yang tercantum dalam UU NO.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tidak terpenuhinya proporsi RTH 30% di Kota Palembang dapat menyebabkan turunnya kualitas ruang terbuka bagi publik/masyarakat.

Tabel 3 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang

No.	Jenis RTH	Ha
1.	Pulau Taman	2,15
2.	Taman Median	21,68
3.	Taman Bahu Jalan	5,51
4.	Taman Pasif	21,37
5.	Taman Interaktif	72,45
6.	Hutan Kota	55,77
7.	RTH Lainnya	3425,56
8.	Pemukaman	178,31
9.	Jalur Hijau (Bahu Jalan kanan-kiri)	477,23
10.	Penambahan Taman tahun 2021	0,3621
11.	Penambahan Taman tahun 2022	0,0025
Total Luas		4.260,39
Persentase dari luas kota Palembang : 40.061 Ha		10,63

Sumber : Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang

Penyediaan RTH berperan penting untuk kelestarian lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau juga memiliki peran strategis untuk mendukung kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat kota. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama yang maksimal dalam penyediaan RTH di Kota Palembang melalui *collaborative governance*.

Dalam proses penyediaan RTH di Kota Palembang, *stakeholder* yang dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang bertanggung jawab menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota serta Bappeda sebagai perwakilan dari pemerintah. Sedangkan dari pihak swasta ada kerjasama dari PT Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel. Dibutuhkan hubungan yang memiliki komitmen terhadap kerjasama dari pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait agar rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dan penyediaan RTH dapat diwujudkan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga melibatkan pihak masyarakat yang dalam penyediaan RTH ini adalah organisasi masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (WALHI). Peran masyarakat dalam penataan ruang merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan karena hasil dari tercapainya penataan ruang adalah untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai sarana untuk mencapai tujuan penataan ruang yang terkait kepentingan publik yakni ruang terbuka hijau.

Topik penelitian mengenai ruang terbuka hijau menjadi kajian yang menarik untuk diteliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Beberapa penelitian melihat dari aspek kebijakan, seperti penelitian (Setyati & Utomo, 2015). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan RTH masih terdapat ketidaktaatan pengembang, yang didasari oleh faktor tidak mematuhi hukum selektif. Selain itu ada pengaruh dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian (Sukowati, 2012) yakni adanya faktor yang menghambat implementasi kebijakan yakni penyediaan RTH yang tidak memadai, kelemahan institusi yang mengelola dan lemahnya peran dari para pemangku kepentingan. Dua penelitian ini saling menguatkan untuk

menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan mengenai RTH tidak berjalan dengan baik ditandai dengan adanya faktor penghambat baik dari pihak pemangku kepentingan maupun pihak pengembang yang seharusnya menyediakan RTH.

Penelitian yang melihat Ruang Terbuka Hijau dari sudut *Collaborative Governance* masih sedikit seperti penelitian (Suratman & Darumurti, 2021) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses *collaborative governance* yang dilalui sudah cukup baik meskipun pembuatan SOP belum dijalankan sebagai salah satu indikator yang harus dipenuhi. Penelitian (Kirana & Artisa, 2020) juga menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi telah berjalan baik dengan melibatkan pihak swasta dan partisipasi masyarakat. Penelitian (Mafaza & Setyowati, 2020) menguatkan hasil penelitian sebelumnya dengan menunjukkan proses kolaborasi yang berjalan baik ditandai dengan tugas pokok yang telah berjalan secara maksimal berdasarkan delapan indikator dari De Seve. Namun hasil penelitian yang bertentangan ditemukan pada penelitian (Fitriyani dkk., 2021), yang menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam Kebijakan RTHP di Kota Magelang belum terlaksana dengan baik hal ini karena belum ada kerjasama yang berkelanjutan.

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena *collaborative governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau dengan menggunakan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan variabel pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Dalam konteks Kota Palembang, ketiga variabel ini menjadi penting dianalisis karena dapat menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau dapat

menunjukkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Collaborative Governance* Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses *collaborative governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dan pemikiran pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dan diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai *collaborative governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran, masukan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait agar penyediaan ruang terbuka hijau di kota Palembang dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2015). *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Cetakan 5). Bumi Aksara.
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 112–127. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Desentralizing Governance: Emerging Concepts an Practices*. Brookings Institution Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The New Public Service: An Approach to Reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3–10. <https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fitriyani, A. E., Astuti, R. S., & Kristanto, Y. (2021). *Collaborative Governance Dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Magelang*. 15.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*. 3, 10.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Lestari, S. P., Noor, I., & Ribawanto, H. (2014). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable City* (Studi Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk). 8.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- O’Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* ANU Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_458884
- Saint-Martin, D., & Thompson, F. (Ed.). (2006). *Public Ethics and Governance: Standards and Practices in Comparative Perspective* (Vol. 14). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1016/S0732-1317\(2006\)14](https://doi.org/10.1016/S0732-1317(2006)14)
- Saleh, Dr. Drs. C., & Hanafi, I. (2020). *Kolaborasi Pemerintahan*. Universitas Terbuka.
- Septiani, E., Muhammadiyah, & Mappamiring. (2021). Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka

- Hijau Di Kabupaten Luwu Utara. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.3858>
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru*. 19(1). <https://doi.org/10.22146/JKAP.7534>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Stoker, G. (2004). *New Localism, Participation and Networked Community Governance*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sukowati, P. (2012). *Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang*. 16(2), 67–78.
- Suratman, F. N., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Tonelli, D. F., Sant'Anna, L., Barcelar Abbud, E., & Aparecida de Souza, S. (2018). Antecedents, process, and equity outcomes: A study about collaborative governance. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1469381. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469381>